

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pemprov DKI dan DPRD Setujui Raperda APBD 2025

◆ Senilai Rp91,34 T

JAKARTA (Poskota) - Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 senilai Rp91,34 triliun.

Pj Gubernur Teguh Setyabudi mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang ABPD DKI Jakarta 2025 secara tepat waktu. Adapun tenggat waktu terakhir untuk persetujuan Raperda APBD, yaitu 30 November 2024.

Persetujuan itu diberikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,

pada Kamis (28/11).

"Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi materi Raperda ini. Sehingga, Raperda ini bisa selesai tepat waktu," kata Pj. Gubernur Teguh.

Adapun nilai anggaran yang direncanakan dalam Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,34 triliun.

Anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta; pemberian bantuan sosial kepada masyarakat

Jakarta; peningkatan akses pemberian hunian layak, aman dan terjangkau; penyediaan ruang terbuka hijau (RTH); serta peningkatan jaringan transportasi publik untuk mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara.

Selain itu, Raperda tersebut juga memfokuskan penanganan stunting pada anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal; upaya penanggulangan banjir dengan peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase; peningkatan layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan berdasarkan standar kebutuhan layanan unggulan stratifikasi

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan; serta mempertahankan kestabilan dan ketahanan pangan, dan penanganan pengangguran melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang berlisensi/sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Kemudian, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. **(*den)**